

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 P.O. Blox 78 Telp. (0293) 363695 ( 5 LINES )  
Fax. ( 0293 ) 364910 Telex. 322716 kod mgl IA Magelang 56101

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Wali Kota Magelang selaku Ketua TPID  
D a r i : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Magelang  
Nomor : 654/121  
Tanggal : 11 Agustus 2023  
Perihal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah  
(TPID) Kota Magelang

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi virtual Pengendalian Inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 31 Juli 2023 perihal Penyerahan Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi dan Rapat Koordinasi virtual Pengendalian Inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 2023, TPID Kota Magelang bersama OPD terkait melaksanakan rapat koordinasi terkait hasil rapat koordinasi tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

**I. Pelaksanaan:**

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 Agustus 2023  
Pukul : 13.00 WIB sd. selesai  
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bagian Perekonomian dan SDA  
Peserta : INSPEKTORAT, BPKAD, DISPERPA, DISPERINDAG,  
DISKOMINSTA, DPU, DISHUB, dan BAGIAN PEREKONOMIAN

**II. Hasil rapat:**

1. Dalam rangka mengantisipasi bencana El Nino yang mengakibatkan gangguan kesehatan karena iklim yang panas dan gangguan pada pangan, Pemerintah Daerah diarahkan untuk memperbanyak Pasar Murah dan memperbanyak anggaran bantuan sembako untuk masyarakat.
2. Pada Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) rilis Juli 2023 Jateng termasuk 12 Provinsi yang masuk skala WASPADA. Peta SKPG adalah komposisi dari aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.
3. Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Kementerian Dalam Negeri mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaporkan data beserta bukti dukungannya yang diinput setiap harinya oleh Inspektorat, yaitu:
  - a. Berkoordinasi dengan BULOG untuk menjaga ketersediaan pangan dalam menghadapi EL NINO;
  - b. Mempersiapkan cadangan/membuat tandon air terutama pada wilayah yang memiliki waduk;
  - c. Memerintahkan camat/lurah melaporkan kondisi wilayah yang mengalami kekeringan;
  - d. Koordinasi antar instansi terkait;
  - e. Stok beras dalam jumlah ton diinput setiap Senin;
  - f. Potensi kekurangan stok beras sebagai dampak EL NINO dalam jumlah ton, input setiap Senin.

4. Berdasarkan data dukung Rakor Pengendalian Inflasi tanggal 7 Agustus 2023 yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri :
  - a. Kota Magelang telah melakukan pemantauan harga, operasi harga, rapat teknis TPID, sidak pasar, menjaga pasokan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil, melakukan gerakan menanam dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.
  - b. Kota Magelang dimasukkan kelompok daerah yang belum melakukan 6 upaya konkrit pengendalian inflasi karena tidak merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan belum melaksanakan kerja sama antar daerah (KAD);
  - c. Indeks Perkembangan Harga (IPH) 20 komoditas Bahan Pangan Terpilih Minggu I Agustus 2023 Kota Magelang sebesar 0,30% dengan simpulan TPID Kota Magelang agar melakukan intervensi dengan melakukan upaya konkrit terhadap komoditas yang mengalami kenaikan 2 minggu berturut-turut yaitu BAWANG MERAH;
5. Highlight/isu komoditas yang mengalami kenaikan adalah jagung, beras dan daging ayam. Sebagai upaya mitigasi, Pemerintah Daerah:
  - a. Mendorong adanya cadangan jagung pakan pemerintah;
  - b. Menghubungkan asosiasi peternak dengan produsen jagung di wilayah surplus;
  - c. Berkoordinasi dengan Perum BULOG untuk ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah;
  - d. Merancang ekosistem pemenuhan cadangan beras pemerintah dengan target 24 juta ton di 500.000 ha;
  - e. Mobilisasi daging ayam ras di wilayah sentra produksi (yang harganya anjlok) ke wilayah yang harga tinggi melalui subsidi angkut (anggaran BAPANAS) dan Tol laut;
6. Dukungan aksi dan kebijakan untukantisipasi dampak El Nino yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
  - a. Penyediaan data pangan yang valid;
    - Survey dan monitoring data stok dan harga pangan;
    - Pemetaan *champion* atau produsen;
    - System kewaspadaan pangan dan gizi;
  - b. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah;
    - Penguatan stok di BUMD pangan;
    - Penguatan lumbung pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal;
    - Penguatan sarana penyimpanan pangan (*cold-chain*) di sentra produksi untuk memperpanjang masa simpan produk pangan;
  - c. Mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit;
    - Fasilitasi biaya distribusi pangan memanfaatkan APBN, maupun APBD;
    - Sinergi dengan Kemenhub untuk optimalisasi Tol Laut, Angkutan Perintis, dan Jembatan Udara;
    - Memperkuat Infrastruktur pendukung logistik dan distribusi pangan;
  - d. Penguatan perlindungan sosial;
    - Penyaluran bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat;
    - Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen dengan memanfaatkan APBN/APBD;

- e. Koordinasi dan kerjasama antar K/L dan Daerah;
    - Koordinasi pemantauan cuaca dan iklim dengan BMKG untuk pengaturan jadwal penanaman, irigasi dan pemeliharaan tanaman secara lebih efektif;
    - Penguatan koordinasi dan pertukaran informasi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
7. Solusi daerah untuk Pengendalian Inflasi:
- a. Kunci utama : isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi *COVID 19*;
  - b. Komunikasi publik : Jangan membuat masyarakat panik. Upayakan masyarakat agar tetap tenang. Lakukan komunikasi yang efektif, tidak menakuti masyarakat, agar tetap tenang dan tetap bekerja;
  - c. Aktifkan TPID. Memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta melaksanakan Rakor secara berkala;
  - d. Aktifkan SATGAS PANGAN DAERAH. Memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada KDH, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (suplai/distribusi);
  - e. BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu;
  - f. Laksanakan gerakan penghematan energi. Menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi (seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, matikan AC apabila tidak perlu);
  - g. Gerakan tanam pangan cepat panen. Sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga;
  - h. Laksanakan Kerja sama Antar Daerah. Daerah *surplus* dengan daerah defisit dan menjalin mencari solusi hambatan dan kendala moda transportasi;
  - i. Intensifkan Jaring Pengaman Sosial: BTT, BANSOS, DAU, BANSOS PUSAT;
  - j. BPS DAN BI umumkan angka inflasi hingga kabupaten dan kota;
8. Pada tanggal 31 Agustus 2023 bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan telah menyerahkan Dana Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi Tahap I Tahun 2023 kepada Provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki kinerja pengendalian inflasi baik;
9. Kebijakan Fiskal diarahkan untuk mendukung pengendalian Inflasi Nasional:
- a. Anggaran PERLINSOS (menjaga daya beli);
  - b. Anggaran subsidi dan kompensasi energi: menjaga daya beli dan terkelolanya *administered price*
  - c. Anggaran ketahanan pangan: penguatan produksi dan cadangan (volatilitas harga pangan menurun) – infrastruktur pertanian, alsintan, sarpras, subsidi pupuk, subsidi bunga, DAK fisik dan non-fisik, dana desa ketahanan pangan;
  - d. Anggaran infrastruktur : penurunan biaya logistik- disparitas harga antar wilayah menurun

10. Indikator penilaian insentif fiskal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023:
- Upaya pengendalian inflasi pangan;
  - Laporan pengendalian inflasi
  - Indeks Pengendalian harga;
  - Realisasi Belanja pendukung pengendalian inflasi
11. Atensi bagi daerah yang belum mendapatkan INSENTIF FISKAL:
- Melaporkan perkembangan harga harian;
  - Melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi daerah secara rutin dan substantif sesuai masalah yang ada dengan berbasis data;
  - Berhasil menekan inflasi yang diukur dari inflasi bulanan dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis BPS;
  - Mengalokasikan dan merealisasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk pengendalian inflasi daerah secara optimal.
12. Agar Kota Magelang dapat memperoleh Dana Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi maka perlu melaksanakan:
- Realisasi BTT;
  - Kerja sama Antar Daerah;
  - Penandaan kegiatan pengendalian inflasi di OPD atau Sub Kegiatan yang belum dimasukkan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kota Magelang Tahun 2022 – 2024, sebagaimana yang tertuang dalam PMK 67/2023 di DINKES, LITBANG (BAPPEDA), BPBD, dan BAGIAN PEREKONOMIAN:
    - Penerbitan sertifikat produksi pangan IRT sebagai Izin produksi untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT;
    - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
    - Pemantauan kebijakan SDA;
    - Pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam;
    - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
  - Revisi peta jalan pengendalian inflasi periode 2022-2024. Yang direvisi adalah kegiatan pada Tahun 2023 dan 2024;

Demikian laporan kami untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKDA KOTA MAGELANG



CHRISATRYA YONAS NUSANTRAWAN B, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690527 200312 1 002

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA  
SETDA KOTA MAGELANG



SALEH APRIYANTO, SE, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670404 199403 1 013

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kota Magelang;
2. Kepala BAPPEDA Kota Magelang;
3. Kepala BPKAD Kota Magelang;
4. Kepala BPBD Kota Magelang;
5. Kepala DISPERPA Kota Magelang;
6. Kepala DISPERINDAG Kota Magelang;
7. Kepala DISKOMINSTA Kota Magelang;
8. Kepala DPU Kota Magelang;
9. Kepala DISHUB Kota Magelang;
10. Kepala DINKES Kota Magelang;